

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sektor pertanian sangat berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian juga tidak akan pernah lepas dari fungsinya sebagai sumber utama untuk penyediaan bahan pangan. Pembangunan pertanian yang berpusat pada masyarakat harusnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena disana masyarakat bebas untuk mengatur peraturan dan melakukan berbagai program pemerintah berbasis kebutuhan masyarakat itu sendiri. Cara agar program pemerintah tersebut dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan keikutsertaan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat diharapkan mampu membuat masyarakat dapat memandirikan diri mereka sendiri (Kartasmita, 1996 dalam Amanah, 2014).

Menurut Rohmani (2015) Peran sumberdaya air bagi pertanian sangat strategis, karena mempengaruhi produktivitas dan kualitas komoditi yang diusahakan. Saat ini peningkatan kompetisi pemanfaatan air semakin dirasakan siring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi berbagai ai sektor.

Irigasi sebagai sumberdaya bersama *common pool resources* (CPRs) memiliki berbagai karakteristik sebagai unit yang dapat berkurang dan kebersamaan dalam penggunaan (Ostrom, 1992 dalam Rohmani 2015). Permasalahan aktual dalam pemanfaatan CPRs adalah terjadinya praktik eksploitasi berlebihan dan tindakan *independen free rider* apabila pengelolaanya tidak disertai dengan mekanisme pengaturan tata kelola dalam pemanfaatan dan penggunaanya. Hal tersebut berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti kerusakan sumber daya air, marginalisasi dan pemiskinan masyarakat lokal, dan dapat memicu konflik antar pengguna sektor ekonomi (Pretty dan Ward, 2001 dalam Rohmani 2015). Oleh karena itu, pengaturan tata kelola dalam pemanfaatan irigasi sebagai sumber daya bersama (CPRs) sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan air bagi pertanian.

Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat mensejahterakan masyarakat bahkan dapat meminimalisir peluang konflik (Noor, 2006 dalam Rohmani, 2015). Bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya dan begitu juga sebaliknya. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi pada masyarakat

yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Dengan modal sosial yang meningkat, hubungan antar masyarakat bisa menjadi produktif sejauh yang diharapkan dan adanya rasa saling percaya antara satu sama lain.

Petani pengguna air irigasi tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Mereka saing berinteraksi dan bekerjasama dalam kelompok pengelolaan irigasi, yaitu P3A dan GP3A, sehingga menarik untuk menganalisis hubungan antara aktivitas individu dengan komunitasnya. Pola-pola perilaku informal yang disepakati dalam organisasi (lembaga) sukareka mampu menciptakan kondisi kondusif timbulnya tindakan terkoordinasi dalam pengelolaan CPRs (Ostrom, 1992 dalam Rohmani, 2015).

Fukuyama (2002) menyatakan bahwa modal sosial yang tumbuh pada suatu komunitas yang didasarkan atas norma-norma bersama akan sangat membantu dalam memperkuat entitas masyarakat tersebut. modal sosial berbeda dengan bentuk modal-modal yang lain, salah satunya adalah kemampuan untuk menciptakan dan mentransfer ide, pemikiran dan sejenisnya. Modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dari berbagai bentuk.

Dalam mengelola jaringan irigasi yang sepenuhnya kewenangan menjadi milik P3A tentu saja modal sosial menjadi bagian yang sangat penting. Hal ini karena P3A merupakan salah satu komunitas/kelompok yang berada di masyarakat, sehingga penting untuk dikaji, serta modal sosial menjadi perekat bagi P3A dalam mengelola jaringan irigasi. Mawarni (2000) dalam Mardikanto (2014) mengidentifikasi beberapa hal tentang pentingnya modal sosial, yaitu sebagai berikut : (a) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas, (b) menjado media pembagian kekuasaan dalam komunitas, (c) mengembangkan solidaritas, (d) memungkinkan mobilitas sumber daya komunitas, (e) memungkinkan pencapaian bersama, dan (f) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Menciptakan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata, memerlukan penyesuaian kelembagaan baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta maupun petani. Pada tingkat petani, dipandang penting untuk mengembangkan kapasitas asosiasi pemakai air menjadi suatu organisasi yang mampu berperan ganda, karena bukan hanya sebagai pengelola jaringan irigasi tetapi juga kegiatan usaha ekonomi.

Menurut Permen PUPR Indonesia No. 17/PRT/M/2015 tentang komisi irigasi bahwa perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan

pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura pada tahun 2016 Sumatera Barat memiliki 1884 kelompok P3A. Diantaranya terdapat 1377 yang merupakan P3A pemula, kemudian 317 merupakan P3A madya dan 190 merupakan P3A maju. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kuranji Sepakat merupakan salah satu P3A maju yang berada di Sumatera Barat. Kelompok P3A Kuranji Sepakat merupakan Kota yang mendapat bantuan Program *Water Resource and Irrigation Sector Management Program* (WISMP). P3A kuranji sepakat memiliki luas area kerja seluas seluas 322,5 Ha. Daerah irigasi yang menjadi wilayah kerja dari P3A adalah Daerah Irigasi Gunung Nago dan Guo. P3A Kuranji Sepakat pernah meraih juara I lomba P3A dan Gabungan P3A/induk P3A tingkat Nasional tahun 2018.

Daerah irigasi (DI) Guo merupakan salah satu wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab dari P3A Kuranji Sepakat. Dalam mencukupi kebutuhan air, maka P3A Kuranji Sepakat harus mampu dalam mengelola jaringan irigasi tersier pada DI Guo. Pengelolaan DI Guo yang sepenuhnya dikelola oleh P3A Kuranji sepakat tentu harus memperhatikan kebutuhan antara bagian hulu, tengah dan hilir. Hal ini mengingat bahwa air menjadi sumber daya alam yang dibutuhkan oleh setiap petani dalam usahatani padi sawah, perikanan harus diorganisir dengan baik agar tidak adanya saling tumpang tindih antar petani yang memakai air sehingga memunculkan konflik untuk mendapatkan air.

Perkumpulan Petani Pemakai Air Kuranji Sepakat tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Mereka saling berinteraksi dalam memanfaatkan atau menggunakan air. Terdapat kepentingan individu dalam mendapatkan air yang berasal dari modal fisik yang sama yaitu DI Guo, membuat petani saling bekerjasama dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi. Sehingga menarik untuk menganalisis modal sosial dalam pengelolaan irigasi tersier pada perkumpulan petani pemakai air Kuranji Sepakat. Di dalam kelompok terdapat perilaku informal yang disepakati dalam organisasi atau lembaga yang sukarela mampu menciptakan kondisi kondusif munculnya tindakan terkoordinasi dalam pengelolaan irigasi. Jika kekompakan petani dalam mengelola jaringan itu ada, maka seluruh anggota P3A kuranji akan mendapatkan air yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan jaringan irigasi tersier pada DI kuranji harus dikerjakan secara bersama oleh P3A

Kuranji sepakat, agar kepentingan individu anggota pun dapat terpenuhi dalam mendapatkan air sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Perkumpulan petani pemakai air kuranji sepakat sudah mendapatkan penghargaan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Namun, pada perkumpulan petani pemakai air kuranji sepakat ini masih terdapat konflik dalam pembagian air. Anggota P3A kuranji sepakat memanfaatkan air untuk mengairi sawah, kolam ikan, dan kebutuhan rumah tangga. Permasalahan lain yang terjadi yaitu pemeliharaan jaringan irigasi yang belum optimal, oleh sebab itu pentingnya modal sosial dalam suatu kelompok P3A dalam penyelesaian masalah tersebut.

Suatu kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi (Hasbullah, 2006).

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana pengelolaan jaringan irigasi tersier pada DI Guo Kelurahan Kuranji Kota Padang
2. Bagaimana modal sosial dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier pada DI Guo Kelurahan Kuranji Kota Padang

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Kajian Modal Sosial Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kuranji Sepakat Pada Daerah Irigasi Guo, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendekripsikan pengelolaan jaringan irigasi tersier pada DI Guo
2. Mengidentifikasi modal sosial dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier pada DI Guo

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kuranji Sepakat dan P3A lainnya, penelitian ini diharapkan dapat bahan masukan agar P3A dapat terus berkelanjutan.

2. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi sebagai menambah ilmu pengetahuan dan sarana dalam menerapkan teori yang didapatkan dari perkuliahan
3. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

